
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DI KELURAHAN 2 ILIR KECAMATAN ILIR TIMUR II KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PASAL 6)

OLEH :

SADAM SAPUTRA: 19.11.218

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Sadam Saputra, NIM. 19.11.218. In 2023, Title: Implementation of Palembang Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Village Community Empowerment Institutions (LPMK) in Village 2 Ilir, Ilir Timur II District, Palembang City, Department of State Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA). Supervisor (I) Dr. Supardi, S.Sos., M.Si and Supervisor (II) Asmawati, S.Sos., M.Si

The goals of community empowerment institutions in villages and sub-districts are still not running optimally, causing slow development of village or sub-district community empowerment institutions. This occurs due to a lack of resource capacity and institutional organizational capabilities. In carrying out empowerment, institutions must have knowledge about empowerment and be more innovative so that they can create empowerment programs that are right on target. Empowerment is not just about creating activity programs, but by looking at the potential that exists in society and then developing that potential and turning that potential into something useful. An area definitely has potential that can be used as an object of empowerment, both the potential of the village's natural resources and the skills of its people.

This research was conducted using qualitative methods. Meanwhile, data collection was carried out by means of observation, in-depth interviews and documentation studies. Data analysis is carried out during data collection, then reducing data, presenting data, verifying and drawing conclusions from research results.

The research results show that the implementation of LPMK in the field is going well and in accordance with applicable regulations. However, there are aspects that need to be improved, such as standard operating procedures (SOP) which have weaknesses in being intervened by individual interests, the quantity of human resources that is not ideal, there are indications that the companion's discretion has the potential to deviate. As well as the socio-cultural environment which is very influential in the continuity of LPMK in the field.

Keywords: *Implementation of Village Community Empowerment Institutions*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kesatuan yang daerahnya dibagi menjadi beberapa Provinsi dan Kabupaten dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah kelurahan atau desa. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 ayat Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota mempunyai pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam mengatur bentuk dan susunan pemerintahan daerah negara mengakui dan negara menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang akan diatur dengan Undang-Undang.

Kewajiban pemerintah dalam upaya memajukan kesejahteraan umum termasuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan di wilayah pemerintahan daerah yang paling bawah, yaitu pemerintahan kelurahan. konsep Negara sejahtera (*welfare state*) sesungguhnya sudah diterapkan sejak Indonesia merdeka. Konsep ini merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada warganya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan memberikan wadah bagi warga masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya peningkatan pembangunan melalui lembaga masyarakat yang terdapat di tingkat wilayah kelurahan. Peran aktif masyarakat sangat berpengaruh demi terciptanya pembangunan secara partisipatif baik dari perencanaan, pelaksanaan,

dan pengawasan. Lembaga Masyarakat Kelurahan dibentuk untuk membantu Lurah dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan.

Lembaga pemberdayaan masyarakat di desa maupun kelurahan masih belum berjalan dengan optimal sehingga menyebabkan lambatnya perkembangan lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Hal ini terjadi karena kurangnya kapasitas sumber daya dan kemampuan organisasional lembaga. Dalam melakukan pemberdayaan, lembaga harus memiliki pengetahuan mengenai pemberdayaan dan lebih berinovasi sehingga dapat membuat program pemberdayaan yang tepat sasaran. Pemberdayaan tidak semata-mata hanya membuat program kegiatan, tetapi dengan melihat potensi yang ada di masyarakat kemudian mengembangkan potensi dan menjadikan potensi tersebut menjadi hal yang bermanfaat. Di suatu wilayah pasti memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai objek pemberdayaan, baik potensi dari sumber daya alam desanya maupun ketrampilan yang dimiliki masyarakatnya.

Oleh sebab itu, program pemberdayaan harus sesuai dengan potensi yang dan tepat sasaran dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Mengetahui permasalahan tersebut, dibutuhkan pendampingan pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat pedesaan baik di kelurahan maupun di desa agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Pemberdayaan masyarakat Kelurahan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan, dengan melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi Kelurahan, pengembangan lembaga keuangan Kelurahan, serta kegiatan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan nilai produktivitasnya.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial. Dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah partisipasi aktif dari seluruh masyarakat demi menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan

serta membimbing masyarakat agar mau bersama-sama melaksanakan program pembangunan. Tolak ukur pembangunan nasional tidak terpusat kepada besaran-besaran ekonomis semata tetapi sekaligus mencakup besaran-besaran sosial budaya seperti keberhasilan dalam pembentukan nilai, pengembangan kelembagaan, penampungan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparat pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Peran pemerintah di sini adalah merencanakan dan mengorganisir program pada tingkat nasional sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Di samping itu pemerintah perlu menyediakan bantuan teknis dan bantuan bahan-bahan pokok, di luar kemampuan masyarakat setempat dan organisasi-organisasi non pemerintahan lainnya.

Partisipasi adalah suatu gejala dimana orang ikut serta dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat kepada kepentingannya dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan atau tingkat kewajibannya. Sehingga Partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

Menghadapi masa depan bangsa di era globalisasi, demokrasi, dan otonomi daerah kehidupan dan ketahanan masyarakat Indonesia sebagai dasar ketahanan nasional memerlukan perhatian dari seluruh kekuatan bangsa demi mewujudkan tuntutan dari hati nurani seluruh rakyat yang mandiri, tangguh, maju, adil, dan makmur sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kekuatan bangsa perlu didukung dengan lembaga yang dapat menyatukan semangat dalam jiwa kehidupan masyarakat kelurahan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Sebagai lembaga yang berperan penting di dalam peningkatan partisipasi masyarakat kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) harus

tetap dijaga dan ditingkatkan sebagai institusi yang mampu menggerakkan pembangunan di segala aspek kehidupan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga kemasyarakatan yang telah berperan aktif dalam pembangunan sebagai mitra pemerintah dan pihak-pihak lain.

Mengutip buku Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan, yang ditulis Eko Sudarmanto dkk (2020:21), pengertian pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan.

Upaya tersebut dimaksudkan guna membangun kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran mereka, serta mengembangkan potensinya. Sementara dikutip dari penjelasan di buku Pengembangan Masyarakat karya Zubaedi (2013:162), konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat.

Menurut Sutopo (2002:45-46) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) harus terlebih dahulu dapat memantapkan kedudukan yaitu sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan yang secara organisasi berdiri sendiri dan bersifat lokal. Dengan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang mengayomi kehidupan Masyarakat dalam Pemberdayaan, memaksa untuk dapat melaksanakan fungsinya agar pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat biasa berjalan lebih optimal dan menyeluruh di wilayah kelurahan. Saran dalam fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan guna mengatasi kendala intern kerjasama dengan akademisi-akademisi atau pihak pemerintah daerah guna pelatihan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan kepada warga kelurahan, dan pemberdayaan fungsi dalam kendala ekstern komunikasi antar pemerintah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan harus ditingkatkan, kelurahan diharapkan dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang ada, untuk mengatasi hambatan mengenai sarana dan prasarana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) kaitanya dengan dana operasional dari Pemerintah Kota dan penambahan dana operasional lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja

kelurahan serta anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan diharapkan secara sukarela meluangkan waktunya (malam hari) untuk membahas masalah-masalah yang ada dan lebih berkonsentrasi pada fungsi agar didalam penerapan antara anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dapat dilaksanakan melalui hubungan kerjasama yang baik.

Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berkedudukan di kelurahan sebagai mitra lurah dibidang pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengawasi mengendalikan pembangunan. Hal tersebut menjadi prioritas utama dari lembaga tersebut.

Salah satu instansi kelurahan yang menerapkan peraturan tentang LPMK adalah Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Namun, berdasarkan observasi awal peneliti awal di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, ditemukan masalah dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam kerjanya antara lain :

1. Tidak efektifnya penyampaian aspirasi masyarakat, hal tersebut dilihat dari kurang maksimalnya waktu pertemuan antara masyarakat dan petugas LPMK dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga belum menjalankan perannya sesuai dengan fungsinya sebagai penggerak dalam pembangunan.
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal tersebut dilihat dari masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk bersama-sama berpartisipasi dan tanggung jawab mengenai kegiatan LPMK seperti gotong royong dan karang taruna serta kurangnya sosialisasi pengurus LPMK kepada masyarakat mengenai LPM itu sendiri.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Peraturan Daerah Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pada Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut ; Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Palembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Palembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

B. LANDASAN TEORI

Implementasi

Kamus Webster (Wahab, 2011:187) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana *"to implementasi"* (mengimplementasikan) berarti *"to provide means for carrying out; to give practical effect to"* (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Riant Nugroho (2014:163), dimana implementasi diartikan sebagai *"getting the job done"* dan *"doing it"*. Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses atau strategi yang dapat dilakukan dengan mudah. Lanjut batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Horn (Wahab, 2011:65) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: *"Policy implementation encompasses*

those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions. "Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, maka kebijakan menurut Wahab (2011: 272) hendaknya:

1. Dirancang sesuai dengan kerangka acuan dan teori yang kuat.
2. Disusun korelasi yang jelas antara kebijakan dan implementasinya.
3. Ditetapkan adanya organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan kebijakan sehingga proses implementasi dapat berjalan dengan baik.
4. dilakukan sosialisasi kebijakan yang akan diterapkan sampai organisasi pelaksana tingkat terbawah (*street level bureaucracy*).
5. Dilakukan pemantauan terus menerus (*monitoring*).
6. Diberi bobot yang sama penting antara kebijakan dan implementasinya. Maksudnya, pembuat kebijakan harus menilai sama penting antara kebijakan dan implementasinya. sehingga antara kebijakan dan implementasinya tidak terjadi kesenjangan yang menyulitkan dalam pelaksanaan.

Dengan demikian, proses (implementasi) kebijakan baru akan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program pelaksanaan telah dibuat, sumber daya kebijakan seperti dana, sarana dan prasarana pendukung, sumber daya manusia (pelaku/agen kebijakan), serta alat kontrol pelaksanaan kebijakan telah ditetapkan dan dialokasikan untuk mencapai tujuan. Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan.

Harsono, (2012:67) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan

terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.

- b. Proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Tahap I

Adapun kegiatan-kegiatannya terdiri atas :

- a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas
- b. Menentukan standar pelaksanaan
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II

Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode ;

Tahap III

Adapun kegiatan-kegiatan meliputi :

- a. Menentukan jadwal ;
- b. Melakukan pemantauan ;
- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.

Namun, suatu kebijakan dan implementasinya tak selamanya dapat berjalan dengan baik. Pasti terdapat berbagai kendala, permasalahan, ataupun kegagalan mencapai tujuan. Sukses tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi. Menurut Wahab, (2011: 272) :

1. Dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal. Jika lembaga eksternal mendukung maka pelaksanaan kebijakan-kebijakan akan berhasil. sebaliknya, jika menolak maka pelaksanaan kebijakan akan gagal. Oleh karena itu agar sukses, pengambil kebijakan dan para pelaksananya harus melakukan penyamaan visi dan persepsi dalam kebijakan yang diambil.
2. Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup.
3. Dukungan dari berbagai macam sumber daya yang ada. Makin banyak yang mendukung makin tinggi tingkat kesuksesannya.
4. Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan. Makin mampu para pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas antara satu kegiatan dengan kegiatan lain atau antara satu kegiatan dengan dampaknya akan semakin tinggi tingkat keberhasilannya.

5. Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang diciptakan dalam tingkat koordinasi.

Sukses gagalnya suatu kebijakan atau implementasinya dipengaruhi oleh seberapa besar dukungan terhadap kebijakan tersebut, adanya sumber daya, dan pemahaman dan kepatuhan dari para pelaku kebijakan. Sehubungan dengan hal itulah sosialisasi kebijakan, sinergisitas kegiatan/proses dari para pelaku kebijakan dan monitoring pelaksanaan kebijakan akan menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Maka diperlukan kerangka untuk memantau itu semua yaitu melalui suatu model implementasi.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup: manusia, dana, dan kemampuan organisasi; yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok).

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2011:68) menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagaimana berikut "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian."

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Model Implementasi

Dalam rangka memecahkan masalah ada beberapa tahap penting dari kebijakan publik antara lain menurut William N. Dunn (Keban, 2014:62) yaitu: penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), Formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*),

dan penilaian kebijakan (*policy assesment*). Akan tetapi dalam kenyataannya betapapun hebatnya suatu kebijakan/rencana yang dibuat tidak akan ada gunanya jika tidak direalisasikan dengan baik dan benar. Maka, tahap implementasi merupakan tahap yang paling penting sehingga model implementasi kebijakan pun menjadi penting untuk diketahui. Berikut beberapa model implementasi kebijakan.

Menurut Keban, (2014:63) Pada prinsipnya terdapat dua pemilahan model implementasi kebijakan, yaitu yang pertama, implementasi kebijakan yang berpola "dari atas ke bawah" (*top-bottomer*) dan dari "bawah ke atas" (*bottom-topper*); dan kedua, implementasi yang berpola paksa (*command-and- control*) dan mekanisme pasar (*economic incentive*). Model *mekanisme paksa* adalah model yang mengedepankan arti penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai monopoli atas mekanisme paksa di dalam negara dimana tidak ada mekanisme insentif bagi yang menjalani, namun ada sanksi bagi yang menolak melaksanakan atau melanggarnya. Model mekanisme pasar adalah model yang mengedepankan mekanisme insentif bagi yang menjalani, dan bagi yang tidak menjalankan tidak mendapatkan sanksi, namun tidak mendapatkan insentif. Model "*top-down*" berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya "*bottom-up*" bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat. Diantara kedua kutub ini ada interaksi pelaksanaan antara pemerintah dengan masyarakat.

Berikut ini beberapa model implementasi dari beberapa tokoh yang dikutip dari Nugroho (2014: 165) :

1. Model Implementasi Donald Van Meter dengan Carl Van Horn

Model kebijakan ini berpola "puncak ke bawah" dan lebih kepada "mekanisme paksa" daripada "mekanisme pasar". Model kebijakan ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier daripada kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Dalam model implementasi kebijakan ini terdapat empat variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan. Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu

kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan dengan prestasi kerja (*performance*). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi.
2. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor.
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
4. Kecenderungan dari pelaksana/implementor.

Hal ini dikemukakan berdasarkan pada kenyataan bahwa proses implementasi ini akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu. Dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi.

Standar dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan. Disamping itu standar dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas komunikasi antar organisasi. Jelasnya respon para pelaksana terhadap suatu kebijakan didasarkan pada persepsi dan interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan menyeimbangkan disposisi yang baik atau positif diantara para pelaksana. Standar dan tujuan juga mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas penguatan atau pengabsahan. Dalam hal ini para atasan dapat meneruskan hubungan para pelaksana dengan organisasi lain.

Hubungan antar sumber daya (*resources*) dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah organisasi tertentu dapat dikemukakan bahwa tersedianya dana dan sumber lain dapat menimbulkan tuntutan dari warga masyarakat swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir untuk ikut berperan dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu kebijakan. Jelasnya prospek keuntungan pada suatu program kebijakan dapat menyebabkan kelompok lain untuk berperan serta secara maksimal dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu program kebijakan.

Bagaimanapun juga dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia, masyarakat suatu negara secara

individual dan kelompok kepentingan yang terorganisir akan memilih untuk menolak suatu kebijakan karena keuntungan yang diperolehnya lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya operasional. Demikian juga dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah tertentu, mempengaruhi karakter-karakter agen-agen pihak pelaksana, disposisi para pelaksana dan penyelenggaraan atau pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Kondisi lingkungan diatas mempunyai efek penting terhadap kemauan dan kapasitas untuk mendukung struktur birokrasi yang telah mapan, kualitas, dan keadaan agen pelaksana (*implementor*). Kondisi lapangan ini juga mempengaruhi disposisi *implementor*. Suatu program kebijakan akan didukung dan digerakkan oleh para warga pihak swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir, hanya jika para *implementor* mau menerima tujuan, standar dan sasaran kebijakan tersebut. Sebaliknya suatu kebijakan tidak akan mendapat dukungan, jika kebijakan tersebut tidak memberikan keuntungan kepada mereka.

Disamping itu karakteristik para agen *implementor* dapat mempengaruhi disposisi mereka. Sifat jaringan komunikasi, derajat kontrol secara berjenjang dan tipe kepemimpinan dapat mempengaruhi identifikasi individual terhadap tujuan dan sasaran organisasi, dalam mana implementasi kebijakan yang efektif sangat tergantung kepada orientasi dari para agen/kantor *implementor* kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri.

2. Model Kerangka Analisis Implementasi (*Framework For Implementation Analysis*) dari Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier

Model implementasi kebijakan ini berada pada kuadran 'puncak ke bawah' dan lebih berada di "mekanisme paksa" daripada "mekanisme pasar". Kedua tokoh tersebut mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

1. Variabel independen yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
2. Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator

kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosioekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap risorsis dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

3. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasilnya tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Berdasarkan bagan tersebut, terlihat bahwa proses implementasi kebijakan tidak terlepas dari faktor atau variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan proses implementasi, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan, kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi, dan pengaruh faktor luar kebijakan. Kesemuanya berpengaruh pada proses implementasi yang dimulai dengan dihasilkannya keluaran (*output*) kebijakan dari organisasi, kemudian menuju kepada kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan. Setelah itu menghasilkan dampak nyata output kebijakan, sehingga hasilnya terlihat melalui perbaikan mendasar terhadap peraturan yang telah atau belum dilaksanakan, yang berguna untuk menilai kinerja implementasi kebijakan untuk selanjutnya dapat diputuskan untuk direvisi atau tidak.

3. Model Implementasi Kebijakan dari Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun

Model ini berada di mekanisme paksa dan pada mekanisme pasar. Menurut kedua pakar ini, untuk melaksanakan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu:

1. Adanya jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/ badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
2. Tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. syarat ini berkenaan dengan feasibilitas dari implementasi kebijakan.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Kebijakan publik adalah

kebijakan yang kompleks dan menyangkut dampak yang luas. karena itu, implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber yang diperlukan, baik dalam konteks sumber daya atau sumber-sumber aktor.

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal. Jadi, prinsipnya adalah apakah kebijakan tersebut memang dapat menyelesaikan masalah yang ditanggulangi.
5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan sebab-akibat, semakin tinggipula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai. Sebuah kebijakan yang mempunyai hubungan kausalitas yang kompleks, otomatis menurunkan efektivitas implementasi kebijakan.
6. Hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, justru implementasi tidak dapat berjalan secara efektif apalagi jika hubungannya adalah hubungan ketergantungan
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar, tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi dan koordinasi adalah asal muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergi.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan adalah syarat bagi efektivitas implementasi kebijakan. tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, maka kebijakan akan tetap berupa kebijakan tanpa ada dampak bagi target kebijakan.

Model Hogwood dan Gunn mendasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktik manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok kebijakan publik. Kelemahannya, konsep ini tidak secara tegas mana yang bersifat politis, strategis, dan teknis atau operasional.

4. Model Marilee S. Grindle

Model ini berada pada mekanisme paksa dan pada mekanisme pasar. Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Di sini Grindle (2000:12) telah

meramalkan, bahwa dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah pasti dihadapkan pada banyak kendala, utamanya yang berasal dari lingkungan (konteks) di mana kebijakan itu akan diimplementasikan. Ide dasar Grindle ini adalah bahwa setelah suatu kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi, maka tindakan implementasi belum tentu berlangsung lancar. Hal ini sangat tergantung pada *implementability* dari program/kebijakan tersebut. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut, yaitu bagaimana konten (isi) dan konteks kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. (Siapa) pelaksana program.
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Hasil Kebijakan :

1. Dampak pada Masyarakat baik Individu dan kelompok
2. Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat

Keberhasilan implementasi kebijakan diukur dengan melihat *gap* (kesenjangan) antara tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program aksi atau proyek yang dijalankan. Dalam artian, apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan (hasil) yang direncanakan. Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai akan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi dapat dideteksi dari konten dan konteks kebijakan.

Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu

5. Model Edward III

George Edward III menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu, *communication, resource, disposition or attitudes*, dan *beureaucatic structures*.

Adapun Model Implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi dari George C. Edward III.

Menurut George C. Edward III (2002:168) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

a. Faktor sumber daya (*resources*)

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup :

- a. Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas ;
- b. Perintah
- c. Anjuran atasan/pimpinan

Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para implementor tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan

fasilitas/sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan yang meliputi: Gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan.

b. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

c. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Menurut teori George C. Edward III Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan” (Nugroho, 2003:201).

d. Faktor Disposisi (sikap)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pengertian dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota. Defenisi lain

tentang peraturan daerah berdasarkan ketentuan undang-undang tentang pemerintah daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh dewan perwakilan daerah dengan kepala daerah, baik diprovinsi maupun di kabupaten/kota. Dalam ketentuan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten /kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan daerah lain.

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.

Ruang lingkup dari peraturan daerah, dalam undang-undang nomor 10 tahun 2004 menjelaskan bahwa peraturan daerah meliputi :

- Peraturan daerah provinsi, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Gubernur.
- Peraturan daerah Kabupaten/Kota, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota.
- Peraturan Desa/ Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan kepala desa.

Kelurahan

Kelurahan merupakan sebuah daerah administratif di wilayah Indonesia yang berada di bawah wilayah kecamatan dan dipimpin oleh seorang lurah. Definisi konsep kelurahan juga ditegaskan oleh Daljoeni yang menegaskan bahwa kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan. Dalam konteks otonomi di Indonesia, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah

Kabupaten/Kota. Selanjutnya kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan -m- dan akhiran -an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan. Kata “pemberdayaan” adalah terjemahan dari bahasa inggris “empowerment”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “power” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas. Secara konseptual pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata (power) (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam membangun masyarakat memberdayakan rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah.

Pasal 5 menjelaskan bahwa tugas LPMK adalah:

1. LPMK bertugas:
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LPMK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 6 membahas fungsi LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPMK memiliki fungsi:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Tinjauan Pembangunan

Pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Mengenai definisi tentang istilah pembangunan itu sendiri, Riyadi (1981:2) mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak, namun kesemuanya itu mengarah kepada ke suatu kesepakatan bahwa: "Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu"

Selaras dengan pengertian di atas, maka secara ringkas dapat dikemukakan bahwa (Mardikanto, 2009:6):

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus

menerus oleh pemerintahan bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintahan, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Pengertian tentang "pembangunan" sebagaimana telah dikemukakan dalam rumusan (Mardikanto, 2009:6) di atas, memberikan arahan bahwa:

- a. Pembangunan, merupakan proses yang dilakukan oleh banyak pihak, dalam upayanya untuk terus menerus memperbaiki mutu-hidup masyarakat dan individu-individu yang menjadi anggotanya.
- b. Dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki itu, kegiatan pembangunan senantiasa memanfaatkan teknologi yang terpilih yang diyakini paling "baik" dalam arti berhasil guna (mangkus) dan berdaya-guna (sangkil).
- c. Di dalam pengertian tujuan pembangunan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat dan individu yang menjadi anggotanya tersebut terkandung pemahaman tentang upaya pemenuhan kebutuhan dan atau pemecahan masalah yang akan dihadapi atau yang telah dirasakan oleh pelaku-pelaku pembangunan tersebut. Yang penting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya.

Partisipasi sebagai tindakan untuk "mengambil bagian" yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedang di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Kerangka Berpikir

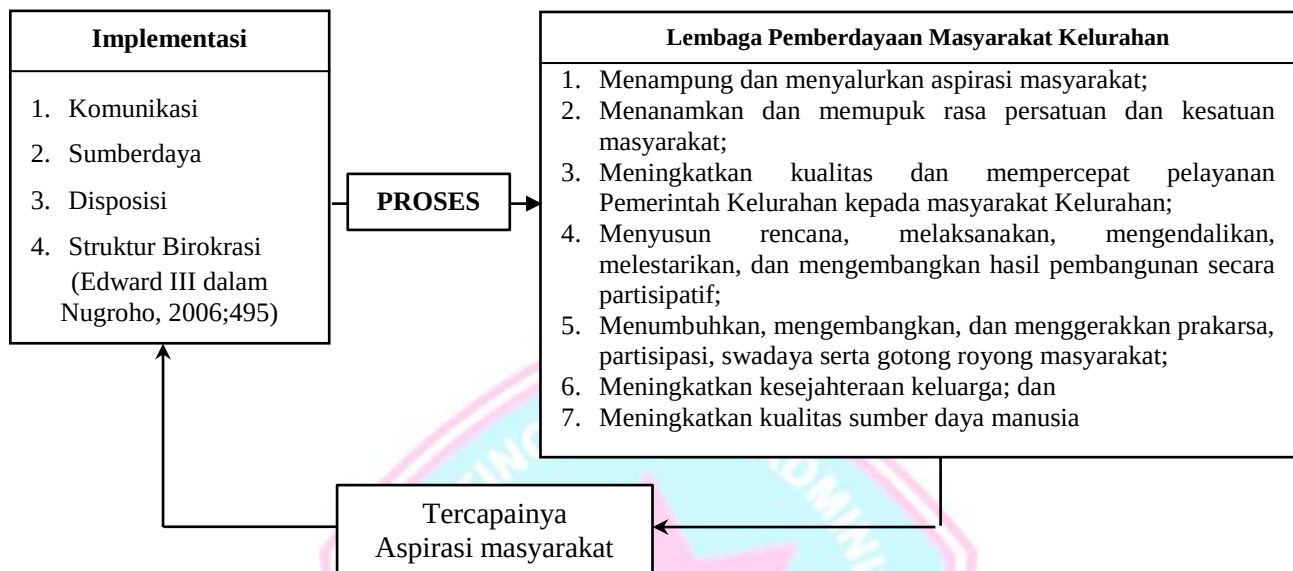
Menurut Uma Sekaran yang dikutip oleh Sugiyono (2012:60), mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Model kebijakan yang digunakan oleh dalam kerangka berpikir adalah model implementasi

Edward III dalam Nugroho (2006:495) karena kelebihan dari kebijakan ini ialah kemampuan menyederhanakan fenomena-fenomena yang kompleks menjadi suatu model implementasi yang sederhana.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar Kerangka Berpikir



Sumber : Dikelola oleh Peneliti

C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Menurut Nawawi dan Martini dalam Prastowo (2011:22) "Metode merupakan cara untuk mengungkapkan kebenaran yang objektif. Kebenaran tersebut merupakan tujuan, sementara metode itu adalah cara.

Menurut Sugiyono (2014:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah (sebagai lawan eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang harus dilakukan oleh peneliti melalui serangkaian prosedur dan tahapan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan tujuan memecahkan masalah atau mencari jawaban terhadap suatu masalah. Penelitian pada hakikatnya merupakan penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

Definisi Konsep

Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 2005:32). Definisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksanaan yang bisa dipercaya.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Definisi Operasional

Menurut Singarimbun dan Effendi (2005:46) bahwa definisi operasional adalah suatu petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur variabel. Variabel dalam penelitian ini Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) pada Kelurahan 2 Ilir Kota Palembang, adapun *Variabel* dan Definisi Operasional yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator
1.	Implementasi (Edward III dalam Nugroho, 2006; 495)	1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
2.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 6)	1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; 2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; 3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan; 4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; 5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat; 6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Informan Penelitian

Andi (2010:147) menjelaskan bahwa, “informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.”

Sumber informasi adalah informan yang berkomponen dan mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing mereka adalah Lurah, Perangkat Lurah dan Masyarakat. Adapun Informan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Lurah Kelurahan 2 Ilir	1 Orang
2.	Sekretaris Kelurahan	1 Orang
3.	Ketua LPMK	1 Orang
4.	Masyarakat	3 Orang
Jumlah		6 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai pertimbangan berdasar konsep teknis yang digunakan, keinginan pribadi, karakteristik empiris dan sebagainya. Menurut Sutopo (2002:21) data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa cara yaitu: Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah langkah awal yang dilakukan oleh peneliti agar observasi yang dilakukan oleh peneliti memperoleh hasil yang maksimal, maka dilengkapi format atau blanko pengamatan sebagai instrumen. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian seperti pendekatan mendalam terhadap lurah, perangkat lurah, ketua LPMK, dan masyarakat untuk mendapatkan data utama dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pada Kelurahan 2 Ilir Kota Palembang

2. Teknik Wawancara

Wawancara ini merupakan langkah kedua setelah observasi percakapan itu dilakukan oleh dua orang pihak yaitu pewawancara yang menyatakan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan informasi penjelasan secara langsung sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya. Alat-alat yang digunakan penulis dalam wawancara adalah buku catatan, laptop, dan kamera karena penulis menggunakan wawancara catatan lapangan.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah penulis melihat beberapa jumlah dokumen-dokumen yang telah dikeluarkan Ketua Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pada Kelurahan 2 Ilir Kota Palembang. Data ini sangat membantu sekali bagi peneliti dalam menganalisa data, dengan dokumen-dokumen kuantitatif ini analisa data akan lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian.

4. Teknik Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, studi pustakanya adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). penetapan studi pustaka tersebut berupa dokumen-dokumen, wawancara dari lurah, perangkat lurah, ketua LPMK, dan masyarakat.

Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut Moleong (2017:280-281) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula dipungkiri bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga fisik dan pikiran sendiri. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengonfirmasikan teori.

Data penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian menggunakan model Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018:249).

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini fokus ditunjukan kepada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

Hasil penelitian merupakan input yang didapatkan oleh penulis melalui beberapa teknik penelitian yang digunakan sebagai dasar penulis untuk mengetahui indikasi-indikasi dan juga fenomena yang terjadi pada tempat yang akan diteliti. Adapun disini penulis dalam mengumpulkan bahan penelitian dan informasi guna untuk menyempurnakan karya tulis skripsi ini, penulis melakukan observasi terlebih dahulu pada objek yang akan penulis teliti. penulis secara langsung datang ke kantor lurah 2 Ilir Kota Palembang dapat melihat dan mempelajari secara langsung fenomena apa dan indikasi-indikasi apa yang ada pada Kelurahan 2 Ilir Kota Palembang.

Setelah penulis melakukan observasi, penulis kemudian melakukan Wawancara yang merupakan proses komunikasi dan sangat menentukan dalam proses penelitian. Dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wawancara diperlukan ketrampilan dari seorang peneliti dalam berkomunikasi dengan responden. Disini penulis mencoba melakukan wawancara dengan melibatkan beberapa informan sebagai dasar penelitian yang dilakukan.

Dalam pengumpulan data dan informasi, penulis juga menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Untuk melengkapi hasil penelitian, teknik terakhir yang penulis gunakan ialah teknik Dokumentasi, dimana penulis melakukan penelitian dengan cara mengabadikan setiap momen kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk photo. Adapun bentuk dokumentasi yang penulis kumpulkan antara lainnya juga ada yang berupa bagan struktur organisasi, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, surat-surat resmi dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian.

Ada 2 konsep yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu konsep Implementasi

dan konsep LPMK. Berikut hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

A. Implementasi

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai dan memerlukan eksekutif jaringan, birokrasi yang efektif, (Setiawan, 2004:39), sedangkan menurut Harsono Implementasi merupakan proses untuk melaksanakan kebijakan tersebut ke dalam tindakan kebijakan politik dalam pembangunan kebijakan administrasi dalam rangka peningkatan program (2002:67). Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

Menurut George C. Edward III (2002:168) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97).

Setiap kebijakan akan dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disampaikan bahwa LPMK telah disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui RT dan RW, kemudian pihak kelurahan dan bersama pihak LPMK yang telah terbentuk bekerja sama dalam melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sesuai dengan perda yang berlaku mengenai fungsi LPMK.

2. Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang

mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Fokus dalam penelitian ini adalah melihat SDM pelaksana, dan Dana. Adapun hasil pengumpulan data yang telah dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi penulis kepada informan bahwa unsur pimpinan LPMK adalah sebanyak 6 orang dan mempunyai 10 unit kegiatan dengan anggota secara keseluruhan sebanyak 25 orang. Sedangkan anggota lainnya merupakan masyarakat yang diikutsertakan dalam kegiatan dan sumber dana berupa bantuan pemerintah kota.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan terhadap suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis berpendapat bahwa sikap para pelaksana implementor telah menjalankan tugasnya dengan baik ini dapat dinilai dari peran pihak kelurahan dan LPMK dalam mengajak warga dalam melaksanakan program kegiatan yang telah dibuat.

4. Strukur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah suatu struktur organisasi yang memiliki tata prosedur, pembagian kerja, adanya hirarki, dan adanya hubungan yang bersifat impersonal. Struktur birokrasi sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis berpendapat bahwa struktur birokrasi pada LPMK sudah sesuai dengan perda no. 4 tahun 2019 pasal 8 tentang kepengurusan dan keanggotaan, adanya, ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang sesuai kebutuhan yang bertugas sesuai dengan tupoksinya.

Hasil penelitian dengan menggunakan empat konsep yang telah penulis paparkan dapat dijelaskan bahwa secara umum implementasi telah terlaksana dengan baik. Ditinjau dari komunikasi telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian tersedia sumber daya manusia yang memadai, sikap pelaksana yang sangat antusias.

B. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 6)

Konsep kedua yang digunakan penulis adalah tentang LPMK. LPMK adalah wadah prakarsa masyarakat kelurahan yang menjadi mitra kerja pemerintah kelurahan untuk menampung dan

mewujudkan aspirasi, serta kebutuhan masyarakat di kelurahan.

Dalam penelitian ini berisi tentang hasil penelitian mengenai fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Penulis menganalisis data-data yang didapatkan dari hasil penelitian dan hasil observasi di lapangan. Berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kelurahan melalui pertemuan warga secara berkala dan insidentil.

Hasil diatas dapat disimpulkan bahwa aspirasi masyarakat merupakan hak masyarakat dalam mengutarakan kehendaknya dan dalam pelaksanaannya LPMK bersama pihak kelurahan telah mengadakan rapat dan pertemuan sebagai sarana masyarakat untuk mengutarakan aspirasinya. Namun dari hasil pengamatan penulis bahwa masih terdapat keluhan-keluhan warga yang menyatakan bahwa masih ada aspirasi dari warga yang belum terwujud atau belum sesuai harapan.

2. Menanamkan dan Memupuk Rasa Persatuan dan Kesatuan Masyarakat

Penanaman dan pemupukan rasa kesatuan dan persatuan masyarakat kelurahan antara lain melalui peningkatan swadaya dan gotong royong pertemuan warga secara berskala dan insidentil.

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antar prngurus LPMK, pihak kelurahan dan warga, LPMK bersama pihak kelurahan bekerjasama membuat suatu pertemuan yang dapat dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan demi terciptanya rasa persatuan.

3. Meningkatkan dan Mempercepat Pelayanan Pemerintah Kelurahan Kepada Masyarakat

Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat kelurahan anatara lain melalui sumber daya dan program yang prima diharapkan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat.

Hasil diatas dapat penulis simpulkan bahwa kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat dari pihak kelurahan bersama LPMK sudah cukup baik, dengan terciptanya sinergitas antara LPMK dan pihak kelurahan dalam menjalankan setiap kegiatan, walaupun masih ada beberapa aspirasi warga yang belum terwujud.

4. Menyusun Rencana, Melaksanakan, Mengendalikan, Melestarikan dan Mengembangkan Hasil Pembangunan Secara Partisipatif

Menyusun rencana, melaksanakan, meng-endalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan melalui pendataan potensi kelurahan, musyawarah pembangunan yang partisipatif, inventarisasi dan pengendalian serta pemecahan masalah pembangunan.

Hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa, perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pengembangan, dan pemeliharaan telah dilakukan secara partisipatif oleh pihak LPMK bersama kelurahan dengan mengikut sertakan masyarakat dalam memberikan masukan untuk pembangunan yang akan dilaksanakan, namun dari hasil pengamatan penulis bahwa tidak sepenuhnya masukan atau aspirasi warga dijalankan sesuai dengan keinginan.

5. Menumbuhkan, Mengembangkan, dan Menggerakkan Prakarsa, Partisipasi, Swadaya serta Gotong Royong Masyarakat

Dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat merupakan bentuk terwujudnya suatu persatuan.

Dari hasil wawancara penulis bersama informan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi LPMK untuk menumbuhkan partisipasi dan semangat gotong royong swadaya masyarakat sudah berjalan cukup baik, disini dapat penulis nilai dari kegiatan-kegiatan gotong royong yang LPMK laksanakan.

6. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui program-program yang dibuat oleh LPMK dan pemerintahan Kelurahan demi kemajuan masyarakat dan pemerintah.

Hasil wawancara diatas dapat menjelaskan bahwa dalam turut serta mensejahterakan kehidupan keluarga, LPMK sebagai mitra pemerintahan cukup membantu dalam mensosialisasikan dan menerima seluruh laporan warga yang berhak dalam menerima bantuan dari pemerintah.

Gambar Aktivitas LPMK Bersama Warga Gotong Royong Melakukan Bersih-Bersih Lingkungan



7. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan secara berkala dan konsisten.

Hasil wawancara diatas dapat penulis nilai bahwa kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang telah dilaksanakan oleh LPMK telah dilakukan, namun pelaksanaan yang diharapkan masih kurang untuk mencapai tujuan yang maksimal, karena dalam keanggotaan LPMK masih sangat kurang sumber daya manusia yang berusia muda padahal dalam keseimbangan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas perlu adanya peran kaum muda untuk meningkatkan efektifitas, efesiensi dan kreatifitas serta percepatan dalam ritme pembangunan.

Pembahasan

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik ditengah Negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan dan pemerintahan (Sunyoto 2004:154).

Menurut Sutopo (2002:45-46) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) harus terlebih dahulu dapat memantapkan kedudukan yaitu sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan yang secara organisasi berdiri sendiri dan bersifat lokal.

Dengan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang mengayomi kehidupan Masyarakat dalam Pemberdayaan, memaksa untuk dapat melaksanakan fungsinya agar pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat biasa berjalan lebih optimal dan menyeluruh di wilayah kelurahan.

Saran dalam fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan guna mengatasi kendala intern kerjasama dengan akademisi-akademisi atau pihak pemerintah daerah guna pelatihan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan kepada warga kelurahan, dan pemberdayaan fungsi dalam kendala ekstern komunikasi antar pemerintah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan harus ditingkatkan, kelurahan diharapkan dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang ada, untuk mengatasi hambatan mengenai sarana dan prasarana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) kaitanya dengan dana operasional dari Pemerintah Kota dan penambahan dana operasional lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja kelurahan serta anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan diharapkan secara sukarela meluangkan waktunya (malam hari) untuk membahas masalah-masalah yang ada dan lebih berkonsentrasi pada fungsi agar didalam penerapan antara anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dapat dilaksanakan melalui hubungan kerjasama yang baik.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan dua konsep dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Implementasi

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai dan memerlukan eksekutif jaringan, birokrasi yang efektif, (Setiawan, 2004:39), sedangkan menurut Harsono Implementasi merupakan proses untuk melaksanakan kebijakan tersebut ke dalam tindakan kebijakan politik dalam pembangunan kebijakan administrasi dalam rangka peningkatan program (2002:67).

Mengacu pada pendapat Edward III, maka hasil penelitian diklasifikasi berdasarkan 4 indikator tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain Menurut teori George C. Edward III Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan” (Nugroho, 2003:201).

Komunikasi dalam hal implementasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan. Adanya komunikasi yang berjalan dengan baik antara pihak-pihak yang terkait. Apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan dikomunikasikan kepada kelompok sasaran, dalam hal ini seluruh warga terlibat sebagai sasaran dan sekaligus sebagai pelaksana dari kebijakan yang diimplementasikan.

Proses penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana harus benar-benar disampaikan dengan tujuan yang ingin dicapai sehingga kesinkronan antara peraturan dan implementasinya dapat berjalan dengan baik. Dari fenomena yang penulis lihat, komunikasi yang terjadi antara pihak kelurahan kepada LPMK dan warga berjalan sesuai aluer, dimana informasi awal yang didapatkan oleh pemerintah kelurahan terkait Perda No. 4 tahun 2019 disosialisasikan kepada warga melalui undangan rapat yang sebelumnya telah disampaikan oleh RT kepada warga.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa LPMK telah disosialisasikan dengan baik kepada warga. Sosialisasi dilakukan melalui RT dan RW serta tokoh masyarakat.

2. Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Fokus dalam penelitian ini adalah melihat SDM pelaksana, dan Dana.

Dalam memenuhi sumber daya pada LPMK, sumber daya yang ada terdiri dari 2, yaitu sumber daya manusia ; dimana LPMK terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang sesuai kebutuhan yang dalam perekrutannya dengan memilih warga yang memiliki syarat sesuai dengan ketentuan perda tentang LPMK, adapun sumber daya berupa dana; LPMK mendapatkan dana dari bantuan pemerintah daerah, swadaya masyarakat dan juga sumbangan dari pihak swasta yang tidak mengikat.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi penulis kepada informan bahwa bahwa unsur pimpinan LPMK adalah sebanyak 6 orang dan mempunyai 10 unit kegiatan dengan anggota secara keseluruhan sebanyak 25 orang. Sedangkan dana anggaran didapat dari bantuan pemerintah daerah, swadaya masyarakat dan sumbangan swasta yang tidak mengikat.

3. Disposisi

Disposisi adalah aspek yang berkualitas dengan sikap dan dukungan para pelaksana terhadap program atau kebijakan. Sikap dan dukungan sangat penting dalam proses implementasi, karena kesamaan pandangan terhadap apa yang dikerjakan bersama akan mempermudah pencapaian tujuan.

LPMK dan pihak kelurahan dalam bekerjasama untuk pembangunan masyarakat kelurahan telah melakukan koordinasi guna kelancaran bersama, sikap pihak kelurahan yang menerima setiap masukan LPMK dan begitu pula sebaliknya sikap LPMK yang menjalankan arahan dari pihak kelurahan menunjukkan kerjasama yang bersinergi.

Berdasarkan hasil analisa penulis bahwa sikap yang ditunjukkan oleh pihak kelurahan dan juga LPMK telah berjalan baik. Ini dapat terlihat dari koordinasi yang dilakukan LPMK sebagai mitra pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan.

4. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

Dalam struktur birokrasi LPMK telah ditetapkan secara jelas bahwa LPMK terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang khusus sesuai kebutuhan dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dari hasil penelitian penulis bahwa didalam lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan telah dibuat struktur organisasinya, telah ditetapkan secara resmi oleh perda yang berlaku. Dimulai dari perekrutannya sampai tugas dan fungsinya masing-masing.

B. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 6)

LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) adalah wadah prakarsa masyarakat kelurahan yang menjadi mitra kerja pemerintah kelurahan untuk menampung dan mewujudkan aspirasi, serta kebutuhan masyarakat di kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, antara lain :

1. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kelurahan antara lain melalui pertemuan warga secara berkala dan insidental.

LPMK bersama pihak kelurahan bekerjasama mengadakan pertemuan ataupun rapat yang dihadiri oleh para warga untuk berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya, setiap masukan-masukan yang dikemukakan oleh warga akan ditampung oleh LPMK yang di kemudian hari akan diwujudkan pelaksanaannya.

Hasil penelitian diatas dapat penulis analisa bahwa aspirasi masyarakat merupakan hak warga dalam turut andil untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di lingkungan kelurahan, warga diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan aspirasinya kepada LPMK yang nanti akan dibahas bersama pemerintahan kelurahan dalam mewujudkan pelaksanaannya. Namun dalam menyerap seluruh aspirasi dari warga LPMK dirasa masih belum begitu maksimal, karena masih ada keluhan-keluhan warga yang mengindikasikan bahwa aspirasi warga tidak sepenuhnya ada yang dilaksanakan ataupun terwujud.

2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat

Penanaman dan pemupukan rasa kesatuan dan persatuan masyarakat kelurahan antara lain melalui peningkatan swadaya dan gotong royong pertemuan warga secara berkala dan insidental.

Pihak kelurahan secara terjadwal melakukan pertemuan dan rapat koordinasi bersama pengurus

LPMK, adapun pertemuan yang diselenggarakan selain mensosialisasikan Perda no. 4 tahun 2019 tentang LPMK, pertemuan tersebut juga diharapkan mampu menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan diantara pihak kelurahan, LPMK dan juga warga.

Dari Hasil temuan dan analisa, penulis dapat menilai bahwa usaha yang dilakukan pihak kelurahan dan LPMK dalam menanamkan dan memupuk rasa persatuan masyarakat sudah baik. Ini dapat dilihat dari terjadwalnya pertemuan antar pengurus LPMK, pihak kelurahan dan masyarakat setempat, adanya silaturahmi yang terjalin dalam pertemuan tersebut menjadikan setiap individu saling mengenal satu sama lain.

3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan

Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan antara lain melalui sumber daya dan program yang prima diharapkan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat.

Sebagai mitra pemerintah, LPMK memiliki peran sebagai penyambung informasi dari kelurahan ke masyarakat, begitu pula sebaliknya setiap aspirasi masyarakat yang terserap akan diteruskan ke pemerintah setempat untuk dapat diwujudkan. Dalam membantu pemerintah untuk mempercepat pelayanan pada masyarakat, LPMK berperan sebagai sarana warga dalam mengetahui dan mendapatkan setiap program pelayanan masyarakat yang ada di kelurahan.

Dari hasil analisa penulis, penulis menilai bahwa dengan adanya LPMK di tengah masyarakat kelurahan, kegiatan pelayanan masyarakat yang ada di kelurahan menjadi lebih terbantu karena dengan adanya peran LPMK, masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan informasi dan sosialisasi mengenai program-program yang dibuat oleh pemerintah.

4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif

Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan melalui pendataan potensi kelurahan, musyawarah pembangunan yang partisipatif, inventarisasi dan pengendalian serta pemecahan masalah pembangunan.

Pengurus LPMK dalam menyusun rencana pembangunan secara prosedurnya selalu mengikut sertakan warga dan juga pihak kelurahan tentunya, para pengurus LPMK biasanya menyerap terlebih dahulu masukan-masukan dari warga pada saat rapat untuk menyusun rencana pembangunan kedepannya yang akan dilaksanakan, setelah aspirasi warga telah ditampung barulah pengurus LPMK bersama pihak kelurahan merealisasikannya ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat kelurahan tentunya. Namun seluruh aspirasi masyarakat sebagian tidak dapat segera diwujudkan karena minimnya sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun dana.

Hasil analisa penulis mengungkapkan bahwa, dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan seutuhnya menjadi tanggung jawab LPMK sebagai pemrakarsa dalam kegiatan pembangunan tersebut. Dengan adanya peran LPMK tersebut, penulis dapat mengatakan bahwa fungsi LPMK sudah berjalan cukup baik walaupun di dalam pelaksanaan pembangunan pastinya menemukan kendala, seperti sumber daya.

5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat

Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat adalah salah satu fungsi daripada LPMK yang begitu penting.

Kegiatan bersih-bersih lingkungan, pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat kelurahan dan juga kegiatan sosial yang diadakan LPMK untuk masyarakat dilakukan secara gotong royong, masyarakat diajak berpartisipasi dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swadaya. Pengurus LPMK bersama pihak kelurahan melalui RT setempat sebelumnya mensosialisasikan kepada warga agar mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Dari hasil penelitian diatas, penulis dapat memberikan analisa bahwa fungsi LPMK dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat telah dilakukan pengurus LPMK secara baik, ini dapat dilihat dari adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMK bersama pihak kelurahan dalam melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan secara gotong royong. Namun penulis juga melihat bahwa ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu

masih minimnya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun dana.

6. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui program-program yang dibuat oleh pemerintah melalui kerjasama LPMK dan pemerintahan Kelurahan demi kemajuan masyarakat dan pemerintah.

Dari hasil penelitian diatas, penulis dapat menganalisa bahwa fungsi LPMK meningkatkan kesejahteraan keluarga merupakan peran LPMK dalam melayani masyarakat agar lebih mudah dalam menerima informasi dan sosialisasi setiap program bantuan dari pemerintah. Namun penulis juga menilai bahwa, besarnya jumlah masyarakat dalam satu wilayah kelurahan tentu saja menjadi kendala bagi LPMK dalam mendata dan juga menyeleksi warga yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Kurangnya sumber daya mengakibatkan kurang maksimalnya proses kerja.

7. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui berbagai penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan secara berkala dan konsisten.

Melalui penyuluhan dan pelatihan yang diadakan oleh pihak kelurahan bersama LPMK, masyarakat diundang dalam setiap rapat di kantor kelurahan dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dari hasil penelitian, penulis dapat menilai bahwa fungsi LPMK dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan pertemuan, penyuluhan dan pelatihan sudah tepat. Namun penulis menemukan kendala yang terjadi pada kegiatan yang dilaksanakan tersebut yaitu, masih kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pelatihan dan kurang tepatnya jadwal yang dibuat panitia sehingga masih ada warga yang tidak bisa hadir.

C. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan 2 Ilir Kota Palembang

Ada beberapa hal yang menjadi penghambat yaitu dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih ada program kegiatan yang belum dijalankan sesuai dengan harapan masyarakat dan juga kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang diadakan dirasa belum begitu

maksimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pada Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (studi kasus pasal 5) secara umum implementasi telah terlaksana dengan baik. Ditinjau dari komunikasi telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian tersedia sumber daya manusia yang memadai, sikap pelaksana yang sangat antusias dan adanya struktur birokrasi yang jelas.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas. Maka, hendaknya Pemerintah Kelurahan 2 Ilir dapat memaksimalkan peranan LPMK dengan memberikan waktu, tempat serta sarana dan prasana yang lebih baik untuk menunjang kegiatan LPMK. Sehingga pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berjalan sesuai harapan. LPMK juga sebaiknya terus berkoordinasi dengan pihak kelurahan agar aspirasi masyarakat yang telah diserap dapat diwujudkan satu per satu.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta
- Awang, S.A. 2008. *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat*. Harapan Prima: Jakarta.
- Bhinadi, Ardito. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish: Yogyakarta.
- Dwiyanto indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analicys* Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Harsono. 2002. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Gafindo Jaya: Jakarta
- Hikmal, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press.
- Nofriansyah, Deny. 2014. *Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Deepublish: Yogyakarta.
- Raho B. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Riyadi dan Braktusumh, S. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Umum: Jakarta.



Siagian P. Sondang. 2008. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*. Bumi Akasara: Jakarta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Surjaweni, Wiratna V. 2020. *Metode Penelitian*. Pusakabarupress: Yogyakarta.

Sulistiyani. 2011. *Manajemen Sumber Daya*. Graha Ilmu: Yogyakarta

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan*. AIPI: Bandung

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi*. Grasindo: Jakarta

Winarno, Budi. 2014. *Etika Pembangunan*. Center For Academic Publishing Service: Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di 2 Ilir.

